

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1.  
Pengukuran Kinerja

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1.	Meningkatnya jumlah cadangan pemerintah;	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	100	54	54,00
2.	Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri Pangan;	Jumlah Pembentukan Desa Mapan	3	2	66,67
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa Rawan Pangan	3	3	66,67
3.	Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat;	Laporan daerah yang distribusi pangannya lancar dan merata (laporan)	1	1	100
4.	Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5%	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95	88,40	93,05

	diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati;				
5.	Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.	Jumlah Komoditi Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Babel	63	78	123,81
6.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100	100	100

Analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1** : Meningkatkan jumlah cadangan pemerintah, dengan indikator :

Persentase Cadangan Pangan Pemerintah

Tabel 3.2.

Indikator Sasaran ke - 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase cadangan pangan pemerintah	100	54	54%

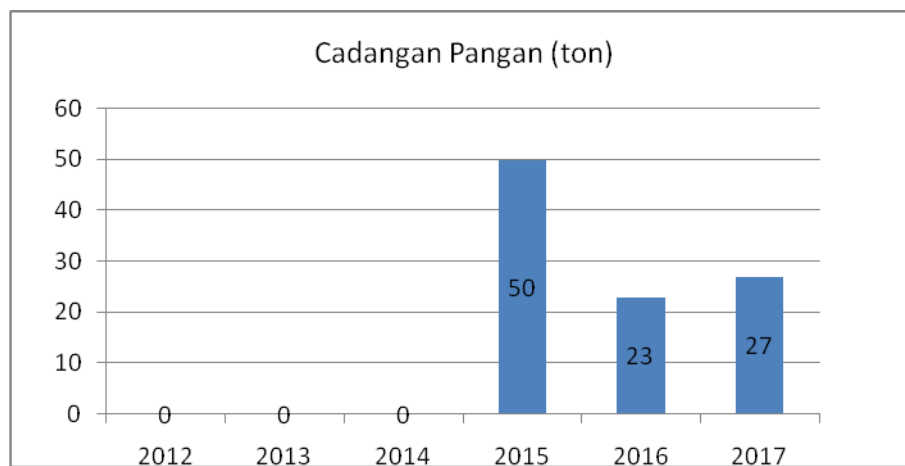
Pada Tabel 3.2. di atas dapat dilihat bahwa realisasi angka persentase cadangan pangan pemerintah tahun 2017 sebesar 54%. Pengadaan cadangan pangan pemerintah pada tahun 2017 sejumlah 30 ton beras, ditambah dengan stok dari tahun sebelumnya total stok beras sebagai cadangan pangan provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejumlah 54 ton atau 27 % dari target total stok cadangan pangan pemerintah provinsi. Jumlah cadangan pangan provinsi yang ditargetkan pada awalnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ditetapkan sejumlah 200 ton, tetapi dengan tidak

berlakunya pelaksanaan SPM tersebut, pada tahun 2015 ditetapkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan cadangan pangan provinsi sejumlah 50 ton, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang kebutuhan pangan utamanya terutama beras dominan berasal dari import dari provinsi lain dibandingkan dengan berasal dari produksi lokal, serta perlu mempertimbangkan anggaran daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan; 2) meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga; 3) meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal; 4) meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok; 5) meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok Pengembangan Cadangan Pangan

Angka Persentase Cadangan Pangan Pemerintah dapat digambarkan oleh grafik di bawah ini :

Grafik 3.1.  
Angka Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2012-2017



Pengembangan Cadangan Pangan pemerintah daerah mengacu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi. Sedangkan pasal 30 ayat 1) menyatakan bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga dan atau keadaan darurat.

Maksud kegiatan ini adalah membantu masyarakat miskin dan atau rawan pangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu, rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Tujuan dari kegiatan ini : a) melaksanakan penyaluran beras akibat dari pasca bencana; b) meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; c) memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; d) Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Sasaran kegiatan ini adalah : masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin beras atau rawan pangan transien di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami : a) kerawanan pangan pasca bencana dan atau keadaan darurat; b) karena gejolak harga yang signifikan; c) Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana; d) rawan pangan kronis karena kemiskinan.

**Sasaran Strategis 2** : Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri Pangan, dengan indikator sebagai berikut:

1. Pembentukan Desa Mandiri Pangan
2. Pemberdayaan Masyarakat di desa Rawan Pangan

Pada Tabel 3.2. ditunjukkan bahwa untuk indikator pertama pembentukan desa Mandiri Pangan dilaksanakan sesuai dengan target renstra bahwa untuk pembentukan desa mandiri pangan minimal 3 desa.

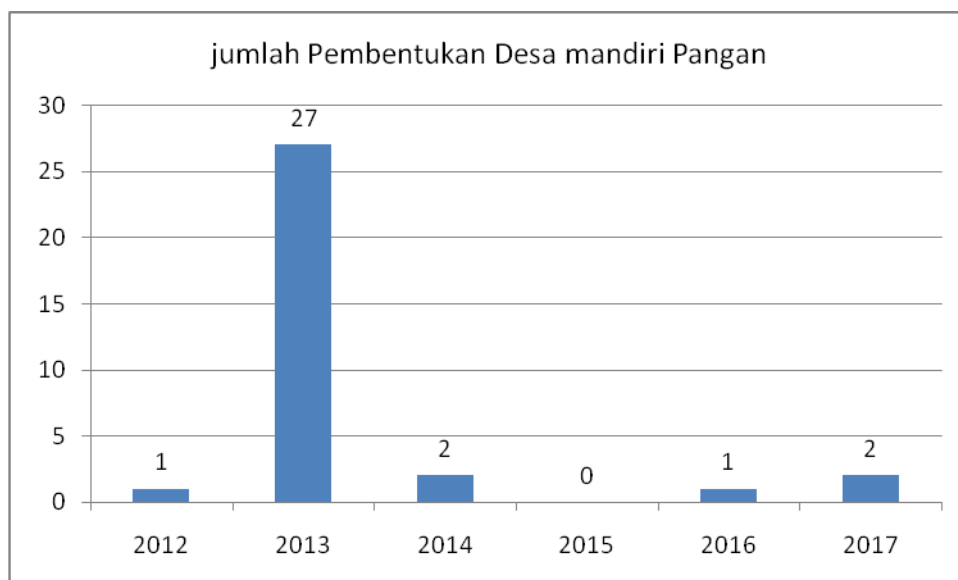
Selanjutnya untuk indikator ke-2, pada tahun 2017 pembentukan Desa Mandiri Pangan sejumlah 2 (dua) desa dari 3 (tiga) desa yang ditargetkan.

Tabel 3.3.  
Indikator Sasaran ke -2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pembentukan Desa Mapan	3	2	66,67
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa Rawan Pangan	3	2	66,67

Jumlah Desa Mandiri Pangan dapat digambarkan oleh Grafik 2.2 di bawah ini :

Grafik 2.2. Jumlah Pembentukan Desa Mandiri Pangan 2012 - 2017



Pada tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya dalam menangani jumlah penduduk rawan pangan, diantaranya melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Tujuan kegiatan ini adalah : 1) monitoring ketahanan pangan wilayah sebagai sarana bagi pemerintah daerah provinsi dalam hal penentuan sasaran target dan memberikan rekomendasi untuk intervensi kerawanan pangan dan gizi sampai dengan tingkat desa dan 2) pelaksanaan intervensi rawan pangan jangka pendek melalui penyaluran bantuan bahan pangan untuk sasaran rawan pangan.

**Sasaran 3 : Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat,** dengan indikator :

Meningkatnya ketersediaan informasi, pasokan harga, distribusi dan akses pangan,

Tabel 3.3.  
Indikator Sasaran ke - 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketersediaan Informasi, pasokan harga, distribusi dan Akses Pangan	1	1	100

Adapun Kegiatan yang mendukung upaya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan di Sentra Produsen
2. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Daerah Terpencil
3. Pemantauan Pasokan Pangan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui disparitas harga antara harga pangan di perkotaan dan pola distribusi pangan tersebut

Pemantauan pasokan pangan merupakan upaya untuk mengetahui jumlah bahan pangan yang masuk ke Bangka Belitung untuk 5 komoditi pangan (beras, telur ayam ras, daging sapi, bawang dan cabe) dengan melakukan pemantauan

distribusi barang di 5 pintu masuk pelabuhan (Pangkalpinang, Mentok, Sungai Selan, Belitung dan Belitung Timur) di Bangka Belitung. Kegiatan ini tentunya harus berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk koordinasi seperti Biro Ekonomi, Disperindag, Dishub, Asisten, Pertanian, Karantina, Pelindo, Kepolisian, BPS serta asosiasi pedagang dan di tingkat lapang berkoordinasi dengan otoritas di pelabuhan.

Maksud dari tujuan ini adalah untuk memastikan jumlah bahan pangan yang masuk melalui 5 pintu masuk pelabuhan di Bangka Belitung sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) diperolehnya data yang lebih valid mengenai arus keluar masuk komoditas pangan di Bangka Belitung; 2) dirumuskannya alternatif sebagai bahan pengambil kebijakan mengenai distribusi pangan; dan 3) mengidentifikasi masalah distribusi dan gangguan kelangkaan pasokan pangan.

Sasarannya adalah pelaku usaha pangan 5 komoditi beras yang pada akhirnya adalah konsumen tidak dirugikan sebagai penerima harga pangan yang tinggi.

**Sasaran 4** : Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati,, dengan indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tabel 3.4.  
Indikator Sasaran ke - 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95	88,40	93,05

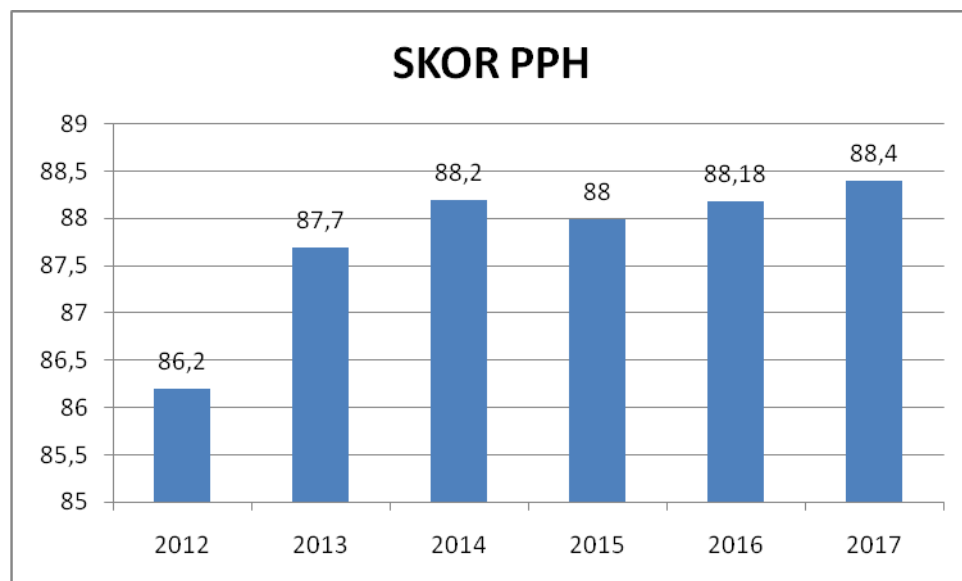
Pada tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa untuk Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan capaian 93,05. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan

penduduk dapat dilihat dari skor pangan dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.

Penilaian situasi konsumsi pangan dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan tahapan penting dalam perencanaan konsumsi pangan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam tahun 2016, skor PPH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 88,17, dibandingkan dengan tahun tersebut, skor PPH pada tahun 2017 meningkat, tetapi masih di bawah target tahun 2017 yaitu 95. Hal ini menunjukkan pola konsumsi pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah beragam, bergizi, seimbang dan aman. .

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam kurun waktu tahun 2012 - 2017 dapat dilihat pada Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2012 - 2017



#### Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan



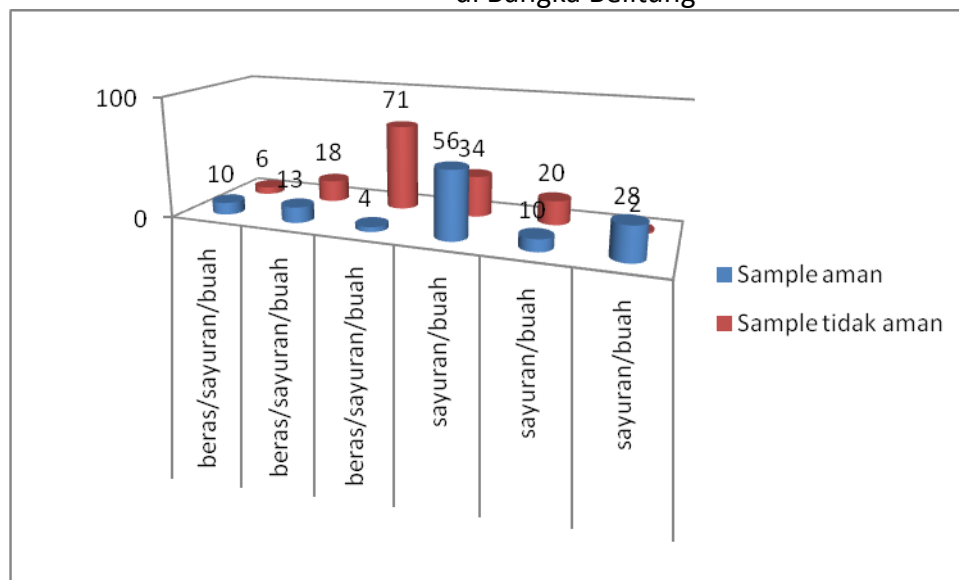
Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah di tingkat kabupaten/kota berdasarkan Pola Pangan Harapan; 2) menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah di tingkat kabupaten/kota berdasarkan klasifikasi fungsi wilayah; 3) menyusun proyeksi konsumsi dan kebutuhan pangan penduduk serta target penyediaan pangan wilayah di tingkat kabupaten/kota dengan pendekatan Pola Pangan Harapan.

**Sasaran 5** : Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen, dengan indikator : Jumlah Komoditi Pangan Segar yang aman dikonsumsi

Tabel 3.5.  
Indikator Sasaran ke – 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Komoditi Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Babel	63	78	123,81

Grafik 2.4. Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Bangka Belitung



Adapun kegiatan yang mendukung terlaksananya penanganan keamanan pangan segar hasil pertanian adalah sebagai berikut :

#### Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah

Untuk mendapatkan pangan yang memenuhi kriteria keamanan pangan, maka dalam produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi dan penyajian makanan harus selalu memperhatikan aspek keamanan dan mutu pangannya. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan segar perlu terus dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan beredar aman dikonsumsi.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, kegiatan penanganan keamanan pangan segar belum dilaksanakan secara optimal terutama pada kegiatan pemantauan dan pengawasan. Belum optimalnya pemantau dan pengawasan keamanan pangan segar ini dikarenakan : 1) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan segar belum optimal; 2) belum berkembangnya sistem peningkatan mutu dan keamanan pangan dan 3) belum adanya laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga sistem penjaminan keamanan dan mutu produk pangan segar belum bisa berjalan dengan baik.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar yang aman bagi masyarakat, melalui cara memberikan jaminan bahwa produk pertanian sebagai bahan baku pangan dan industri bebas dari kontaminasi bahaya biologis, kimia dan fisik serta menjaga kompetensi dalam pembinaan dan pengawasan mutu hasil pertanian melalui pelaksanaan GAP, GHP, GMP, GDP baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur penunjang (otoritas kompeten, laboratorium penguji).

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar yang aman bagi masyarakat; 2) meningkatnya pemantauan dan pengawasan keamanan pangan melalui sampel pangan segar;

3) tersedianya sarana untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan pangan segar.

Sasaran yang ingin dicapai adalah permohonan sertifikasi pangan segar sebanyak 3 permohonan di pelaku usaha/kelompoktani pangan segar pertanian.

**Sasaran 6** : Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD, dengan indikator : Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD.

Tabel 3.6.

Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100	100	100

## 1.2. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2017 memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

### a) Anggaran Bersumber dari APBD

Berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 besaran anggaran sebelum mengalami perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah seperti pada Tabel 2.10

Tabel 2.10. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya jumlah cadangan pemerintah;	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	

				1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	365.615.000
				2. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	119.315.000
2.	Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri Pangan;	Jumlah Pembentukan Desa Mapan	Desa	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa Rawan Pangan	Desa	1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	595.150.000
				2. Penanganan Daerah Rawan Pangan	241.510.000
3.	Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat;	Laporan daerah yang distribusi pangannya lancar dan merata (laporan)	Laporan	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	
				1. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	69.385.000
				2. Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	128.160.000
				3. Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan	74.100.000
				4. Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan	98.625.000
4.	Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati;	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	
				1. Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan	206.272.500
				2. Lomba Cipta Menu Pangan Beragam Bergizi Bereimbang dan Aman	146.950.000
				3. Pengkajian Makanan Tradisional	50.148.500
				4. Pengembangan Pangan Lokal	289.000.000
				5. Promosi Pangan Lokal	171.557.500

				6. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani	90.900.000
5.	Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.	Jumlah Komoditi Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Babel	Komoditi	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	
				1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	126.160.000
				2. Operasional OKKP-D	179.340.000
				3. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	86.100.000
6.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	Persen	<b>Program Pelayanan Adminisitrasi Perkantoran</b>	
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
				2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	75.000.000
				3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	114.360.000
				4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.000.000
				5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40.000.000
				6. Penyediaan alat tulis kantor	68.600.000
				7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99.999.850
				8. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan	45.000.000
				9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000
				10. Penyediaan makan dan minum	39.000.000
				11. Rapat koordinasi dan konsultasi ke	250.000.000

				luar daerah	
				12. Penyediaan jasa Penunjang Pengelelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	257.490.000
				13. Koordinasi konsolidasi ke dalam daerah	150.000.000
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
				1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000
				2. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	234.280.000
				3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000
				4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0
				<b>Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
				1. Peningkatan dan Pelatihan Formal	91.000.000
				<b>Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.665.000
				2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	45.600.000
				<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	
				1. Operasional Dewan Ketahanan Pangan	111.215.000
				2. Penyusunan	79.545.650

				Database Ketahanan Pangan	
				3. Penyusunan Study Kelayakan Perekonomian dan Teknologi Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung	0

Dari tabel diatas, dapat disampaikan jumlah anggaran yang mendukung terhadap sasaran Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Belanja Langsung sebesar Rp. 5.062.044.000,- dan Belanja Tidak Langsung 5.011.385.318,34,-

**b) Anggaran Bersumber dari APBN**

Dana Dekonsentrasi :

Anggaran Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi Anggaran Tahun 2017 berjumlah Rp. 2.037.700.000,- terdiri dari :

**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :**

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 855.500.000,-
2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 777.200.000,-
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 355.000.000,-

**c) Anggaran dan Realisasi Terhadap Sasaran Tahun 2017**

**Realisasi Anggaran APBD**

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 5 (lima) sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 berikut dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD. Untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 5.142.738.400,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.480.245.312,14 sehingga total anggaran sebesar Rp 9.622.983.712,14 Berikut ini

adalah rincian sasaran, kegiatan, anggaran, dan realisasi anggaran, seperti pada tabel 2.11. berikut.

**Tabel 2.11. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2017**

**Tabel 2.10. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2017**

No	SASARAN STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
				(Rp)	(%)
1	2			5	6
1.	Meningkatnya jumlah cadangan pemerintah;	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>			
		1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	309.115.000	285.388.800	92,32
		2. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	87.835.000	87.154.900	99,23
2.	Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri Pangan;	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>			
		1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	543.730.000	525.184.700	96,59
		2. Penanganan Daerah Rawan Pangan	291.510.000	288.009.500	98,80
3.	Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat;	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>			
		1. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	69.385.000	50.066.000	72,16
		2. Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	117.040.000	115.640.700	98,80
		3. Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan	71.700.000	66.548.980	92,82
		4. Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan	89.825.000	88.250.000	98,25
4.	Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>			
		1. Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan	206.272.500	204.418.400	99,10



	umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati;	2. Lomba Cipta Menu Pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman	146.950.000	139.138.200	94,68
		3. Pengkajian Makanan Tradisional	47.223.500	45.788.100	96,96
		4. Pengembangan Pangan Lokal	100.000.000	96.428.400	96,43
		5. Promosi Pangan Lokal	171.557.500	156.500.300	91,22
		6. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani	90.900.000	90.340.000	99,38
5.	Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>			
		1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	126.160.000	118.137.600	93,64
		2. Operasional OKKP-D	179.340.000	172.517.075	96,20
		3. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	86.100.000	85.487.000	99,29
6.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	14.999.000	99,99
		2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	75.000.000	66.001.318	88,00
		3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	114.360.000	105.640.000	92,37
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.000.000	19.669.000	56,20
		5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40.000.000	29.220.000	73,05
		6. Penyediaan alat tulis kantor	56.000.000	55.990.500	99,98
		7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.118.250	68.450.500	75,96
		8. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan	10.000.000	6.293.000	62,93
		9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	19.749.000	98,75
		11. Penyediaan makan dan	39.000.000	24.747.000	63,45

		minum			
		12. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000	249.811.375	99,92
		13. Penyediaan jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	257.490.000	257.400.000	99,97
		14. Koordinasi konsolidasi ke dalam daerah	150.000.000	149.515.800	99,68
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
		5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.571.000	26.100.000	94,66
		6. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	234.280.000	181.299.900	77,39
		7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	0
		8. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	212.430.000	194.910.000	91,75
		<b>Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
		2. Peningkatan dan Pelatihan Formal	91.000.000	63.132.701	69,38
		<b>Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
		3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.300.000	58.615.000	56,74
		4. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	58.000.000	48.814.250	84,16
		<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>			
		4. Operasional Dewan Ketahanan Pangan	0	0	0
		5. Penyusunan Database Ketahanan Pangan	79.545.650	71.746.000	90,19
		6. Penyusunan Study Kelayakan Perekonomian dan Teknologi Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung	450.000.000	424.969.000	94,44
	Jumlah Belanja Langsung		5.142.738.400,00	4.752.072.899,00	92
	Jumlah Belanja Tidak Langsung		4.480.245.312,14	4.412.034.613,00	98,48

Total	9.622.983.712,14	9.164.107.512,00	95,23
-------	------------------	------------------	-------

Dari tabel diatas, memperlihatkan jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang mendukung kepada Sasaran Strategis Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 9.622.983.712,14,- terealisasi sebesar Rp. 9.164.107.512,- atau 95,23 %. Dibawah disampaikan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah cadangan pemerintah

Indikator :

Persentase Cadangan Pangan Pemerintah, dengan target 100%, realisasi sebesar 54%, yaitu jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi sebesar 27 ton pada akhir tahun 2017 dari target jumlah cadangan pangan sebesar 50 ton.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

2. Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri Pangan

Indikator :

Jumlah Pembentukan Desa Mapan, dengan target 3 desa mandiri pangan

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa Rawan Pangan, dengan target 3 desa. Untuk masing- masing indikator tersebut realisasi sebesar 2 desa atau capaian realisasi 66,67%.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

3. Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat;

Indikator :

Laporan daerah yang distribusi pangannya lancar dan merata (laporan), dengan target 1 laporan, dengan realisasi 1 laporan untuk masing-masing kegiatan.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat, Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok, Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan, serta Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan.

4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati

Indikator :

Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan target 95 realisasi 88,4.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan, Lomba Cipta Menu Pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman, Pengkajian Makanan Tradisional, Pengembangan Pangan Lokal, Promosi Pangan Lokal, serta Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani.

5. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.

Indikator :

Jumlah Komoditi Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Babel, dengan target 63 komoditi, dengan realisasi 78 komoditi.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan, Lomba Cipta Menu Pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman, Pengkajian Makanan Tradisional, Pengembangan Pangan Lokal, Promosi Pangan Lokal, serta Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani.

6. Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD.

Indikator :

Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD, dengan target 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makan dan minum, Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Koordinasi konsolidasi ke dalam daerah, Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, Peningkatan dan Pelatihan Formal, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah, Operasional Dewan Ketahanan Pangan,

Penyusunan Database Ketahanan Pangan, dan Penyusunan Study Kelayakan Perekonomian dan Teknologi Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung.

### **Realisasi Anggaran APBN**

Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 memperoleh anggaran dana bersumber dari APBN dengan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 2.037.700.000,- dengan realisasi Rp. 1.995.689.750,- atau 97.94%.

Adapun rincian kegiatan dan realisasinya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 855.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 851.773.950,- atau 99,56%.
2. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.550.000,- atau 99.10%.
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 777.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 753.983.100,- atau 97.01%.
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 355.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 340.382.700,- atau 95,88%.

### **1.3 . Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017**

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, dibandingkan dengan Target Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditargetkan dilihat pada Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Target s.d 2017
				Tahun ini	Tahun lalu	
	Meningkatnya ketersediaan energi dan penyediaan protein per kapita/hari	ketersediaan energi 2.400 kkal/kap	<b>2490</b>	<b>103,75</b>		<b>2400</b>
		Persentase ketersediaan energi protein penduduk 63 gr/hari	<b>71,56</b>	<b>113</b>		<b>63</b>
	Meningkatnya kesiapan dalam megantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah (ton)	<b>54</b>	<b>54</b>		<b>100</b>
		Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi (kab/kota)	<b>7 Kab/Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>49</b>
		Jumlah Desa Mandiri Pangan (desa)	<b>2</b>	<b>66,67</b>		
	Meningkatnya kelancaran dan Pemerataan distribusi pangan ke masyarakat	Persentase daerah yang distribusi pangannya lancar dan merata (%)	<b>100</b>	<b>100</b>		
	Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani	Skor PPH	<b>88,40</b>	<b>93,05</b>		<b>95</b>

	dan nabati sehingga tercapai peningkatan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat					
	Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar	Persentase pangan segar yang aman (%)	<b>78</b>	<b>123,81</b>		<b>63</b>
	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>